

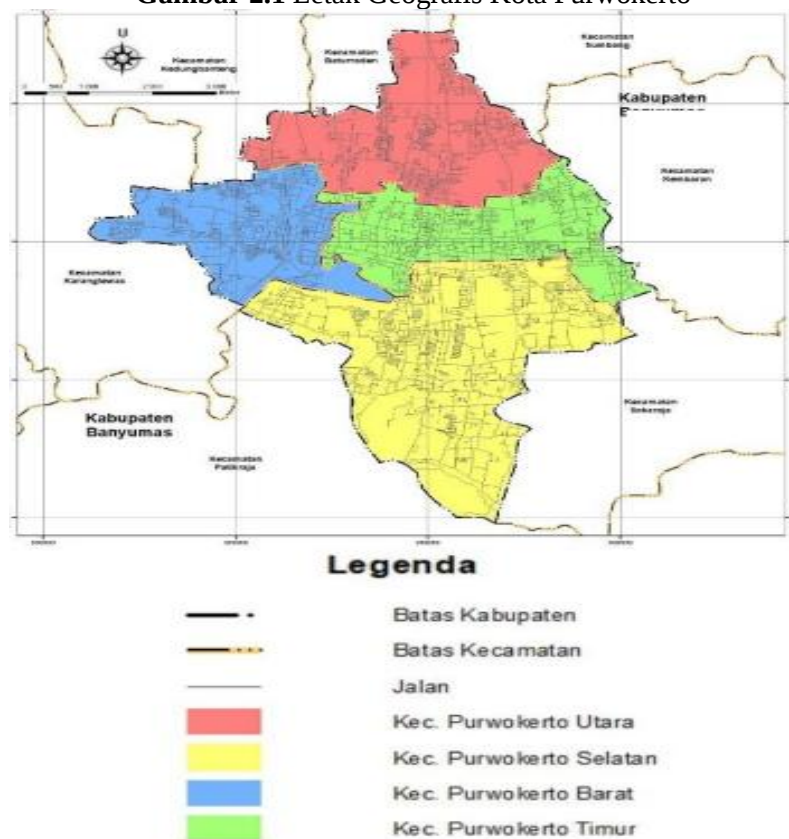
BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PURWOKERTO DAN KEBIJAKAN ZONASI DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

2.1 Gambaran Umum Kota Purwokerto

2.1.1 Kondisi Geografis

Gambar 2.1 Letak Geografis Kota Purwokerto



Kota Purwokerto adalah kota besar akan tetapi non-otonom pada pulau Jawa, Indonesia. Kota ini merupakan daerah Bakorwil 3 pusat koordinasi pemerintahan daerah dan kota terbesar di Jawa Tengah bagian barat daya atau dikenal sebagai wilayah *Barlingmascakeb*. Kota Purwokerto juga menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada populasi empat distrik yang

membentuk kota Purwokerto yakni di tahun 2010 terdapat 233.951, sedangkan pada tahun 2020 adalah 229.271; tahun 2023 pertengahan berjumlah 233.865. Purwokerto terletak di Tengah Pulau Jawa pada Provinsi Jawa Tengah dekat dengan kaki Gunung Slamet yaitu gunung tertinggi kedua di Jawa dengan ketinggian rata-ratanya adalah 187,87 meter; maksimum 286 meter; dan minimumnya 71 meter di atas permukaan laut. Kota Purwokerto ini dipisahkan oleh Sungai Kranji dan bagian jalan utama bagian timur-barat merupakan Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto.

2.1.2 Kondisi Demografis

Dahulu, Kota Purwokerto setara dengan kota administrative dan sekarang berubah menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas. Purwokerto juga dibagi menjadi empat distrik administratif (kecamatan) seperti sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Administratif (Kecamatan) dan Jumlah Penduduk Kota Purwokerto Pada Pertengahan Tahun 2023

Administratif (Kecamatan)	Jumlah Penduduk
Purwokerto Selatan	73.753 Jiwa
Purwokerto Timur	55.679 Jiwa
Purwokerto Barat	53.860 Jiwa
Purwokerto Utara	50.573 Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Pada kecamatan Purwokerto Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 58.451 jiwa tahun 2023 yang terdiri dari 28.905 laki-laki dan 29.546 perempuan. Wilayah Kecamatan Purwokerto Timur terbagi menjadi 6 kelurahan yang terdiri:

1. Kelurahan Arcawinangun
2. Kelurahan Kranji

3. Kelurahan Mersi
4. Kelurahan Purwokerto Lor
5. Kelurahan Purwokerto Wetan
6. Kelurahan Sokanegara

Berdasarkan data di tahun 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Purwokerto Timur sendiri mencapai 58.403 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk di masing-masing wilayah yaitu, Kelurahan Sokanegara 7.783 jiwa, Kranji terdiri 9.760 jiwa, Purwokerto Lor 12.364 jiwa, Purwokerto Wetan 8.158, Mersi 7.075 jiwa, dan Arcawinangun 13.263 jiwa.

Dibalik kemajuan yang terjadi pada kota purwokerto, masih terdapat berbagai masalah sosial ekonomi seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran. Meski permasalahan tersebut telah ditanggulangi dengan berbagai bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, akan tetapi tantangan dalam distribusi sumber daya dan akses pada peluang ini masih menjadi isu yang cukup kompleks jika dikaitkan dengan permasalahan pendidikan sebagai penunjang sarana menimba ilmu bagi generasi dimasa depan.

2.2 Gambaran Umum Pendidikan di Kecamatan Purwokerto Timur

Kecamatan Purwokerto Timur merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banyumas yang memiliki peranan wilayah strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah keatas. Berdasarkan data terbaru khususnya untuk sekolah di Kecamatan Purwokerto Timur yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Tahun 2022/2023

No.	Kecamatan	Sekolah		Jumlah
		Negeri/ <i>Public</i>	Swasta/ <i>Private</i>	
1	Jatilawang	1	1	2
2	Rawalo	1	1	2
3	Kebasen	0	1	1
4	Kemranjen	0	1	1
5	Sumpiuh	1	1	2
6	Tambak	0	2	2
7	Somagede	0	0	0
8	Kalibagor	0	0	0
9	Banyumas	1	0	1
10	Patikraja	1	0	1
11	Purwojati	0	0	0
12	Ajibarang	1	1	2
13	Gumelar	0	1	1
14	Pekuncen	0	0	0
15	Cilongok	0	1	1
16	Karanglewas	0	0	0
17	Kedungbanteng	1	0	1
18	Baturraden	1	0	1
19	Sumbang	0	0	0
20	Kembaran	0	0	0
21	Sokaraja	1	4	5
22	Purwokerto Selatan	0	2	2
23	Purwokerto Barat	0	1	1
24	Purwokerto Timur	4	5	9
25	Purwokerto Utara	0	1	1
Banyumas		13	23	36

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Berdasarkan analisis data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, pada wilayah Kecamatan Purwokerto Timur sendiri memiliki empat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yaitu SMA Negeri 1 Purwokerto, SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA N 4 Purwokerto, dan SMA Negeri 5 Purwokerto. Sehingga dilihat dari data tersebut jumlah ini mencerminkan adanya konsentrasi dalam institusi pendidikan

negeri di wilayah tersebut. Namun, jika diamati pada konteks persebaran pendidikan di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan data ini masih menunjukkan ketimpangan. Beberapa kecamatan hanya memiliki satu sekolah negeri, sementara wilayah Kecamatan Purwokerto Barat dan Purwokerto Selatan tidak memiliki akses sekolah negeri sama sekali. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa di daerah yang jauh dari pusat pendidikan atau luar radius zonasi yang telah ditentukan. Sehingga ketimpangan ini menjadi indikator bahwa kebijakan zonasi, meskipun bertujuan untuk mendekatkan akses pendidikan, masih memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Maka agar mencapai pemerataan pendidikan yang lebih optimal, diperlukan upaya strategis seperti penambahan jumlah sekolah negeri di wilayahh dengan kebutuhan tinggi atau peningkatan fasilitas di sekolah swasta agar dapat menjadi alternatif yang setara untuk masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pendidikan dapat dioptimalkan guna mengatasi ketimpangan ini dan menciptakan sistem yang lebih inklusif serta efisien.

Pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022/2023, kebijakan zonasi diterapkan bertujuan untuk memastikan pemerataan persebaran peserta didik baru di tiap-tiap sekolah. Masing-masing sekolah pasti memiliki kuota atau daya tampung yang telah ditetapkan guna mendukung prinsip pemerataan supaya meminimalisis permasalahan ketimpangan, sehingga peserta didik dapat tersebar secara proporsional di berbagai wilayah yang berada dalam radius zonasi.

Tabel 2.3 Daya Tampung dan Jumlah Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Purwokerto Timur

No.	Sekolah	Daya Tampung	Jurusan	Total
1.	SMA Negeri 1 Purwokerto	238	Matematika/IPA	332
		62	IPS	
		32	Bahasa dan Budaya	
2.	SMA Negeri 2 Purwokerto	256	Matematika/IPA	352
		64	IPS	
		32	Bahasa dan Budaya	
3.	SMA Negeri 4 Purwokerto	192	Matematika/IPA	320
		128	IPS	
4.	SMA Negeri 5 Purwokerto	224	Matematika/IPA	352
		96	IPS	
		32	Bahasa dan Budaya	

Sumber: arsip.siap-ppdb.com/2022/banyumas

Berdasarkan data yang telah tersedia, pendidikan tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Timur menunjukkan bahwa adanya variasi dalam daya tampung dan distribusi jurusan yang ditawarkan pada setiap sekolah. Data tersebut relevan dalam memahami bagaimana kebijakan zonasi mempengaruhi pemerataan akses pendidikan dan persebaran peserta didik baru. Dalam perbedaan daya tampung dan persebaran jurusan antar sekolah diduga dapat menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan. Seperti pada SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 5 Purwokerto cenderung daya tampungnya lebih banyak dibandingkan dengan SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 4 Purwokerto, hal ini terjadi karena kemungkinan pada SMA 2 dan SMA 5 memiliki fasilitas dan sumber daya pendukung dibanding dengan sekolah yang daya tampungnya lebih kecil seperti SMA Negeri 4 Purwokerto.

Meskipun dari jumlah daya tampung di duga masih menyebabkan terjadinya kualitas pendidikan, namun sebenarnya dengan dibentuknya daya

tampung atau kuota yang berbeda-beda pada setiap masing-masing sekolah ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam mendistribusikan peserta didik secara merata sesuai dengan kapasitas sekolah dalam suatu wilayah. Sehingga kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh dalam semua wilayah, meskipun pada saat implementasi kebijakan masih terdapat tantangan keterbatasan kuota di sekolah tertentu karena jarak zonasi.

2.3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di Kecamatan Purwokerto Timur

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan strategis yang diimplementasikan oleh pemerintah guna meningkatkan pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi diskriminasi dalam layanan pendidikan. Kebijakan ini dirancang agar seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan setara dalam mengakses atau mendapatkan pendidikan yang berkualitas di sekolah negeri terdekat. Namun, pada implementasi kebijakan zonasi di Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun ajaran 2022/2023 masih tetap muncul sejumlah tantangan dan permasalahan yang signifikan, baik bagi peserta didik baru maupun dengan pihak sekolah. Salah satu dari permasalahan utama yang penting adalah keterbatasan kuota di sekolah-sekolah negeri. Kondisi tersebut menyebabkan banyak calon peserta didik yang tinggal disekitar sekolah tidak bisa diterima dikarenakan kuota telah dipenuhi oleh siswa dari prioritas lain seperti pada jalur afirmasi, atau perpindahan tugas orang tua. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa tujuan dari adanya pemerataan pendidikan dalam kebijakan zonasi ini belum sepenuhnya tercapai secara efektif dan efisien.

Selain itu terdapat masalah lain yang sering muncul seperti jarak dan transportasi. Peserta didik yang tidak diterima di sekolah yang terdekat sering kali harus mendaftar diluar zona tempat tinggal mereka. Konsekuensinya, keluarga mereka harus menanggung tarif biaya yang dikeluarkan untuk transportasi yang digunakan untuk menuju sekolah serta menghadapi perjalanan yang lebih lama. Dampak ini biasanya dirasakan oleh keluarga menengah kebawah, yang justru sebagai salah satu sasaran utama dari kebijakan zonasi ini diterapkan. Disamping hal itu, masih ada ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah yang menjadi isu penting dan tidak bisa diabaikan. Seperti sekolah yang berada di zona dengan peminat tertinggi biasanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan tenaga pengajar lebih kompeten. Sebaliknya, dengan sekolah di zona rendah daya tarik cenderung akan menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun kualitas pendidik. Ketimpangan ini tidak hanya memperkuat persepsi ketidakadilan dimasyarakat, akan tetapi bisa menurunkan motivasi dan prestasi peserta didik disekolah tertentu.

Permasalahan berikutnya yang biasa terjadi dalam munculnya suatu kebijakan tidak jauh dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu. Pada kebijakan zonasi ini masih terdapat kecurangan yang terjadi seperti manipulasi data domisili, dan adanya surat sakti. Beberapa orang tua/wali dari peserta didik akan memanfaatkan celah atau kecurangan pada aturan zonasi untuk memasukkan anak mereka ke sekolah favorit di luar zona tempat tinggal mereka dengan berbagai macam cara. Hal tersebut tidak hanya merusak prinsip keadilan yang menjadi pionir utama kebijakan zonasi, tetapi juga bisa merugikan peserta

didik lain yang sebenarnya berhak mendapatkan prioritas di sekolah tersebut. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul tadi, mencerminkan adanya tantangan yang kompleks dalam implementasi kebijakan zonasi di Kecamatan Purwokerto Timur. Hendak diperlukannya evaluasi pada dampak kebijakan menjadi hal penting untuk mengidentifikasi bagaimana dan sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya dan apa saja yang sebenarnya terjadi dibalik layar ketika kebijakan ini berlangsung agar bisa diperbaiki. Sebagaimana dampak yang dirasakan oleh peserta didik baru dan pihak sekolah memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan ini sekaligus bisa menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dimasa mendatang sesuai dengan apa yang diinginkan peserta didik agar lebih mudah mendapatkan pendidikan yang adil dan setara tanpa ada pembeda atau ketimpangan antar kualitas sekolah satu dengan sekolah lain baik dari fasilitas, tenaga pengajar, dan sebagainya.